

**STRATEGI DINAS TENAGA KERJA, KPERASI DAN USAHA KECIL  
MENENGAH (UKM) DALAM MENANGGULANGI PENGANGGURAN DI  
KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI**

Marshanda Zhafiroh  
NPP. 31.0199

*Asdaf Kota Jambi Provinsi Jambi  
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor*

Email: marshandazhafiroh@gmail.com  
Dosen Pembimbing: Dr. Gatningsih, MT

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** This research is based on the number of unemployment figures in Jambi City which have not yet reached the target. and is a serious problem that must be resolved immediately by the Jambi City Government, especially through the relevant agencies, namely the Jambi City Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises Service. **Purpose:** This research aims to discuss the strategy of the Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Disnakerkopukm) in overcoming unemployment in Jambi City. **Mehtod:** By using descriptive qualitative methods to get a direct picture of the problems and efforts that occur in the field through observation, interviews and documentation obtained. .The data that has been obtained is analyzed using data reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. **Result:** The results of the research show that the strategy carried out by the Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Jambi City has been effective, namely by socializing the job seeker registration system, making company regulations for private companies, and optimizing employment programs and activities by maximizing human resources (HR). **Conclusion:** The strategy of the Department of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Jambi City in tackling unemployment is good and is based on the dimensions of objectives, policies and programs, each indicator of which has been fulfilled by the department.

**Keywords:** Strategy, Unemployment, Office of Manpower, Cooperatives and Small and Medium Enterprises Jambi City

**ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** Penelitian ini didasari oleh jumlah angka pengangguran di Kota Jambi yang belum mencapai target. dan menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Jambi khususnya melalui instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi. **Tujuan:** Penelitian ini

bertujuan untuk membahas tentang strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerkopukm) dalam menanggulangi pengangguran di Kota Jambi

**Metode:** Menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai permasalahan dan upaya yang terjadi di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi sudah efektif yaitu dengan mensosialisasikan sistem pendaftaran pencari kerja, membuat peraturan perusahaan terhadap perusahaan swasta, serta mengoptimalkan program dan kegiatan ketenagakerjaan dengan memaksimalkan sumber daya manusia (SDM). **Kesimpulan:** Strategi dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam menanggulangi pengangguran sudah baik dengan didasari oleh dimensi tujuan, kebijakan, dan program yang masing-masing indikatornya sudah terpenuhi oleh dinas tersebut.

**Kata Kunci:** Strategi, Pengangguran, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penduduk adalah bagian penting dari suatu negara dan merupakan dasar dari Pembangunan. Penduduk merupakan fokus dalam pembangunan, selain karena penduduk adalah modal dasar dalam pembangunan, juga karena pembangunan yang dilaksanakan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk itu sendiri (Hutasoit, 2017). Indonesia yang memiliki 278,8 juta penduduk, terdapat 49,7% atau 138.303.472 orang perempuan dan 50,3% atau 135.576.278 orang laki-laki. Namun, berdasarkan produktifitas penduduk Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ada 208,54 juta orang yang usia kerja pada Februari 2022. Dari jumlah ini, hanya 144,01 juta orang yang pengangguran, yang merupakan 69,06 persen dari total penduduk usia kerja. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai program pembangunan telah difokuskan pada pembangunan wilayah, terutama wilayah dengan tingkat pengangguran yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk meningkatkan efektivitas dalam mengurangi pengangguran, perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, perlu juga adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak terkait lainnya, seperti dunia usaha dan lembaga pendidikan, agar upaya penanggulangan pengangguran dapat berjalan lebih efektif (Rambe et al., 2019).

Dalam konteks penanggulangan pengangguran, pendekatan yang terintegrasi, terpadu, dan sinergis memang sangat penting. Hal ini akan memastikan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling mendukung dan menghasilkan dampak yang lebih besar (Hia, 2013). Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi antara berbagai instansi terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah (Denay, 2002). Selain itu, perlu

juga adanya kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Harlik et al., 2013).

Tingkat Pengangguran Terbuka yang cukup tinggi di Kota Jambi menunjukkan adanya tantangan dalam menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk seluruh angkatan kerja. Variasi yang tinggi dalam rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih pekerja juga menggambarkan disparitas ekonomi yang mungkin ada di Kota Jambi. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi ini, diharapkan langkah-langkah yang diambil dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dapat lebih tepat sasaran. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. TPT 2021 Kota Jambi adalah sebesar 10,66 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 11 orang penganggur. Rata-rata upah/gaji/pendapatan bersih sebulan pekerja yang dirinci menurut kabupaten/kota pada Agustus 2021 memperlihatkan adanya variasi yang tinggi, berkisar antara 1,68 juta rupiah sampai dengan 2,50 juta rupiah (BPS Provinsi Jambi).

Minimnya pertumbuhan permintaan tenaga kerja di semua sektor merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Upaya untuk menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 9,6% dari 10,6% adalah langkah yang memang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perluasan kesempatan kerja di Kota Jambi, seperti minimnya perusahaan yang bergerak di bidang akomodatif, kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan, dan kurangnya infrastruktur pelatihan, memang memerlukan solusi yang komprehensif. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyediakan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta pemberian insentif kepada perusahaan yang aktif dalam menciptakan lapangan kerja, dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Jambi.

## **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil**

Kendala-kendala yang dihadapi dalam perluasan kesempatan kerja di Kota Jambi, seperti minimnya perusahaan yang bergerak di bidang akomodatif, kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan, dan kurangnya infrastruktur pelatihan, memang memerlukan solusi yang komprehensif. Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam menyediakan pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta pemberian insentif kepada perusahaan yang aktif dalam menciptakan lapangan kerja, dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Jambi.

Peningkatan dikarenakan pandemi Covid-19 kemarin yang dampaknya masih berpengaruh hingga sekarang dan mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan. Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki daya tarik sendiri untuk menarik banyak orang untuk datang (Yuliyanti & Handayani, 2022). Banyak imigran yang berkuliah dan

setelah lulus tidak mau kembali ke daerah asalnya untuk mencari lowongan pekerjaan melalui dinas tenaga kerja, sehingga terukurlah angka pengangguran yang tinggi. Belum lagi banyaknya tenaga kerja yang tidak dibekali dengan keterampilan dan keahlian sebelum terjun ke dunia kerja yang sangat kompetitif. Karena setiap tahun yang diwisuda banyak, sementara lapangan pekerjaan belum banyak terbuka. Akhirnya, dikembangkan *entrepreneurship* kepada anak-anak remaja dan juga para ibu-ibu yang masih berjalan sampai sekarang.

Program-program yang ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi pada tahun 2020 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas, perlindungan, dan produktivitas tenaga kerja di Kota Jambi. Program-program tersebut mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan fasilitasi dan pengadaan pelatihan tenaga kerja, menyediakan informasi tenaga kerja, serta menyediakan fasilitasi untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan perlindungan hukum serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan aman bagi tenaga kerja di Kota Jambi. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi secara keseluruhan. Upaya tersebut ternyata belum mencapai tingkat keberhasilan yang diperlukan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jambi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Jambi, khususnya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, harus memiliki strategi yang tepat untuk menangani masalah pengangguran di Kota Jambi. Ada banyak faktor yang menghalangi program-program tersebut untuk berhasil mengurangi angka pengangguran di Kota Jambi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Menanggulangi Pengangguran Di Kota Jambi Provinsi Jambi”

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks strategi dinas tenaga kerja, koperasi maupun usaha kecil menengah dalam menanggulangi permasalahan pengangguran di berbagai daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2023) yang berjudul “Strategi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam Mengatasi Pengangguran pada masa Pandemi Covid-19”, menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi pengangguran pada masa pandemi mengacu pada rencana strategis Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Rahma, 2023). Lalu penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana (2019) dengan judul “Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di kota Batam”, menyatakan bahwa Strategi Strength-Opportunity (SO) yaitu meningkatkan UPD pegawai dalam mengatasi pengangguran serta meningkatkan sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dengan Kementerian ketenagakerjaan. (B) Strategi Strength – Threat (ST) yaitu meningkatkan pelaksanaan

pelatihan-pelatihan. (C) Strategi Weakness-Opportunity (WO) yaitu meningkatkan sarana dan prasarana serta meningkatkan kerja sama instansi atau stakeholder. (D) Strategi Weakness-Threat (WT) adalah meningkatkan penguatan dari sisi kelembagaan sumber daya manusia serta meningkatkan kemudahan dalam perizinan para insvestor (Nurdiana, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz (2019) yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pencari Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Grobogan” dengan kesimpulan Pemberdayaan masyarakat pencari kerja dalam mengurangi angka pengangguran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan secara garis besar sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan teori pemberdayaan yang dikemukakan Mardikanto (Mumtaz, 2022). Selanjutnya, Auliya (2021), memperoleh hasil penelitian bahwa Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Magetan pada masa pandemi Covid-19 adalah: Program fasilitasi permasalahan proses produksi, Pelatihan diversifikasi produk usaha mikro, Pengembangan promosi produk usaha mikro, Peningkatan jaringan antar lembaga, dan fasilitasi standarisasi produk usaha mikro (Auliya, 2021). Penelitian serupa dilakukan oleh (Sunaini & Winarni, 2020), (Asrul, 2020), (Hasbiyyah, 2018), (Bungkuran et al., 2022) dan (Tarmayati et al., 2020) tentang peran dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Mikro dan Tenaga Kerja terhadap penganggulan pengangguran yakni peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam pembinaan koperasi bermasalah ialah dengan pandampingan koperasi secara intens, diadakannya berbagai pelatihan seperti; pelatihan manajemen koperasi, pelatihan peningkatann SDM koperasi, pelatihan pembuatan laporan keuangan/pembukuan, membantu pelaksanaan RAT. Peran lainnya ialah bantuan penguatan permodal koperasi dengan memfasilitasi koperasi dengan pihak-pihak terkait seperti perbankan. Hambatan dan dukungan yang diterima pada saat melakukan pembinaan ialah kurangnya pegawai di lingkup dinas koperasi, kurang disiplinnya koperasi dalam melaporkan RAT, ketidak ramahan pegurus koperasi bahkan tidak berada di tempat ketika pihak Dinas koperasi melaksanakan monitoring. Sedangkan dukungan dalam pembinaan ialah adanya pemanfaata media internet sehingga permasalahan dapat dengan segera diatasi, adanya dukungan moril dari pemerintah daerah dan adanya kolaborasi dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah dan KPRI Sekunder & primer.

Penelitian serupa oleh Fadzillah (2020), dengan judul “Strategi Dinas Koperasi Ukm Dan Perdagangan Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Perkembangan Industri Kreatif Bagi Umkm” menghasilkan kesimpulan Pemberdayaan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, fasilitas kebutuhan para pelaku UMKM dan pendampingan yang sudah dijalankan dengan baik. Namun, masih adanya kekurangann dari segi pemberdayaan yang belum sepenuhnya optimal dari segi pelatihan maupun fasilitas yang diberikan belum sesuai. Untuk itu perlu mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan secara rutin yang terjadwal, peningkatan peran dinas harus di optimalkan dalam promosi produk

dan penyediaan tempat sentra serta melakukan pendampingan keahlian di bidang manajemen keuangan dan pemasaran.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni strategi untuk menanggulangi pengangguran di kota Jambi baik itu dari Dinas Tenaga Kerja, koperasi dan juga Usaha Kecil Menengah (UKM), metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi, faktor penghambat dan juga Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam penanggulangan pengangguran.

### **II. METODE**

Peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian dengan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran langsung di lapangan dikarenakan permasalahan yang akan diteliti belum memiliki kejelasan. Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari kepala dinas tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah kota jambi; kepala bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja; kepala bidang hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan koperasi; kepala seksi pendataan dan jaminan sosial tenaga kerja; kepala seksi perluasan kesempatan kerja; pencari kerja sebanyak 2 orang; serta Perusahaan/swasta yang bekerja sama dengan dinas tenaga kerja.

Dalam penelitian data-data yang sudah didapatkan untuk selanjutnya dianalisis dan diolah kembali menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan yang dihasilkan melalui metode kualitatif ini pun sifatnya tidak permanen atau sementara yang artinya dapat berubah baik itu berkurang ataupun bertambah selama pelaksanaan penelitian. Penelitian akan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi agar memperoleh keseluruhan data dan informasi yang diperlukan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi**

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerkop UKM) Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016. Dinas ini bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, koperasi, dan usaha kecil menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah

(Disnakerkop UKM) memiliki tugas pokok membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah.

### **3.2 Strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Jambi**

Pelaksanaan pembangunan daerah, memiliki kondisi dimana terdapat kerampungan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa datang dalam kurun waktu tertentu, Dalam konteks tersebut, penting untuk melakukan evaluasi dan perencanaan ulang agar kinerja pembangunan dapat lebih sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Hal ini melibatkan identifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi, seperti kekuatan yang belum optimal, kelemahan yang perlu diatasi, peluang yang bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang perlu diantisipasi. Dengan demikian, strategi pengembangan wilayah dapat disesuaikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Strategi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam menangani masalah pengangguran di Kota Jambi berpedoman peraturan-peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan menjadi urusan pemerintah daerah. Melalui landasan hukum tersebut Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mengadakan berbagai Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang dalam hal ini Dinas bekerja dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Jambi serta LPK swasta di Kota Jambi. Dan program-program yang dibuat dan dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi ini, jenis pelatihannya pun berdasarkan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Peserta pelatihan pada umumnya berasal dari pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dan juga sudah terdaftar di database Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dari masing-masing kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Jambi.

Dalam Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dinas berperan sebagai Pembina, mediator, dan pembimbing dalam hubungan industrial yang juga berarti bahwa Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menjadi penyedia layanan bagi sebuah perusahaan yang berkenaan dengan permasalahan hubungan kerja baik antara perusahaan dan karyawan maupun perusahaan dan masyarakat serta menjamin bahwa hak dan kewajiban tenaga kerja seimbang dan berjalan semestinya.

### **3.3 Kendala Yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Dalam Menanggulangi pengangguran**

Dari data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam menangani permasalahan pengangguran juga mengalami beberapa kendala yang berasal dari internal maupun eksternal dinas. Kendala-kendala ini umumnya berkenaan dengan segala yang terjadi dalam proses penanganan masalah pengangguran.

Mulai dari tahapan perumusan kebijakan hingga pada saat diberlakukannya kebijakan tersebut.

Dari hasil observasi di lapangan menunjukkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi juga mengalami kendala-kendala dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Jambi. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, bapak Indra Sahputra, SE pada hari rabu tanggal 11 Januari 2024 bertempat di ruang kerja beliau, kendala-kendala yang paling utama dalam mengatasi masalah pengangguran ini adalah minimnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang akomodatif dalam penyediaan pendukung di lapangan pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja yang mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan di segala bidang. Selain itu, kurangnya kesadaran perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jambi untuk selalu berkoordinasi dalam melaporkan lowongan pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. Selain itu, kurangnya infrastruktur di bidang pelatihan, seperti pelatihan di bidang perkebunan dan di bidang market.

### **3.4 Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi Dalam Menanggulangi pengangguran**

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pengangguran di kota tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: Dinas tersebut berusaha menangani permasalahan ketenagakerjaan dengan melakukan pembinaan dan teguran terlebih dahulu sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah PHK yang dilakukan Perusahaan; Dinas tersebut berupaya memperbaiki hubungan industrial antara perusahaan dan karyawan dengan mempersulit prosedur PHK, sehingga diharapkan perusahaan lebih mempertimbangkan untuk memberikan pembinaan dan kesempatan kepada karyawan sebelum melakukan PHK; Dinas tersebut juga mengedepankan musyawarah sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara perusahaan dan karyawan, dengan harapan dapat mencapai keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak; serta Dinas tersebut bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta, untuk melakukan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Jambi.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dengan penelitian yang diperoleh oleh (Rindi Yuliyanti, Nida Handayani 2022) adalah Kecamatan Ciparay dan Dinas Ketenagakerjaan melakukan pelatihan tenaga kerja, melakukan berbagai kegiatan padat karya, memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan melakukan kegiatan job fair. Dalam penelitian ini juga Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat berupa pelatihan di Lembaga khusus pelatihan yang diadakan oleh dinas tersebut. Pada penelitian oleh (Sugianto, Yul Tito Permadhy 2020) membahas tentang penyebab pengangguran yang beda dari yang peneliti lakukan, yaitu pada penelitiannya faktor penyebab terjadinya pengangguran salah satunya dari sisi pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang



memadai, lapangan kerja yang minim pada daerah tersebut dan keterbatasan menerima informasi. Sedangkan pada penelitian ini penyebabnya banyak dari perselisihan dengan perusahaan swasta dan kurangnya kesadaran masyarakat.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dari data yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam menangani permasalahan pengangguran juga mengalami beberapa kendala yang berasal dari internal maupun eksternal dinas. Kendala-kendala ini umumnya berkenaan dengan segala yang terjadi dalam proses penanganan masalah pengangguran. Mulai dari tahapan perumusan kebijakan hingga pada saat diberlakukannya kebijakan tersebut.

Dari hasil observasi di lapangan menunjukkan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi juga mengalami kendala-kendala dalam mengatasi masalah pengangguran di Kota Jambi. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, bapak Indra Sahputra, SE pada hari rabu tanggal 11 Januari 2024 bertempat di ruang kerja beliau, kendala-kendala yang paling utama dalam mengatasi masalah pengangguran ini adalah minimnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang akomodatif dalam penyediaan pendukung di lapangan pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja yang mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan di segala bidang. Selain itu, kurangnya kesadaran perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jambi untuk selalu berkoordinasi dalam melaporkan lowongan pekerjaan ke Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. Selain itu, kurangnya infrastruktur di bidang pelatihan, seperti pelatihan di bidang perkebunan dan di bidang market.

Permasalahan pengangguran di Kota Jambi menjadi tugas dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi untuk mengupayakan langkah-langkah pencegahan dan solusi dalam menanganinya. Namun seiring dengan prosesnya banyak kendala-kendala yang menjadi penghambat bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi untuk mengatasi pengangguran

## **IV. KESIMPULAN**

Strategi dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam menanggulangi pengangguran sudah baik dengan didasari oleh dimensi tujuan, kebijakan, dan program yang masing-masing indikatornya sudah terpenuhi oleh dinas tersebut dan hanya memiliki satu kekurangan yaitu pada indikator regulasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi belum memiliki regulasi khusus mengenai pengangguran. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam menanggulangi pengangguran terbagi menjadi tiga, yaitu terbatasnya sumber daya dan infrastruktur yang ada, hubungan Kerjasama dengan Perusahaan swasta yang berselisih dengan tenaga kerja maupun dengan dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM; Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi untuk dalam rangka menekan angka pengangguran; Terbatasnya kesempatan kerja yang

tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja di Kota Jambi yang terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi dan SMA sederajat yang setiap tahunnya terjadi kelulusan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam menanggulangi pengangguran adalah Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang ketenagakerjaan; Membuat peraturan perusahaan Menyusun peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; serta memaksimalkan program dan kegiatan ketenagakerjaan yang sudah berjalan

**Keterbatasan Penelitian** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kota saja sebagai model studi kasus. Dan penelitian ini hanya mengidentifikasi permasalahan pengangguran dan analisis Upaya yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja, koeprasi dan usaha kecil menengah setempat.

**Arah Masa Depan Penelitian** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi dalam menanggulangi pengangguran dan dapat memberikan Solusi atau program yang dapat membantu permasalahan tersebut.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Asrul. (2020). *Peran Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Dalam Pembinaan Koperasi Bermasalah di Kabupaten Sinjai* [Institus Agama Islam Muhammadiyah Sinjai]. <http://repository.uiad.ac.id/id/eprint/1054/1/SKRIPSI ASRUL.pdf>
- Auliya, A. N. (2021). *Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Magetan Pada Masa Pandemi Covid-19* [Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/12978>
- Bungkuran, A., Tampi, G. B., & Mambo, R. (2022). Analisis Strategi Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dalam Menganggulangi Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(3), 146–152. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/42254>
- Denay, H. (2002). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menurunkan Angka Pengangguran di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat* [Institut Pendidikan Dalam Negeri]. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=MnxYTUAAAAAJ&citation\\_for\\_view=MnxYTUAAAAAJ:hqOjcs7Dif8C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MnxYTUAAAAAJ&citation_for_view=MnxYTUAAAAAJ:hqOjcs7Dif8C)
- Harlik, Amir, A., & Hardiani. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

- dan Pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 109–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1500>
- Hasbiyyah, S. (2018). *Strategi Pengembangan UMKM Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas* [Institut Agama Islam Negeri Purwokerto].  
<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/download/1220/1206/>
- Hia, Y. D. (2013). Strategi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *Jurnal Economica*, 1(2), 77–82.  
<https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Alfabeta.  
[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=MnxYTyUAAAAAJ&citation\\_for\\_view=MnxYTyUAAAAAJ:hqOjcs7Dif8C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MnxYTyUAAAAAJ&citation_for_view=MnxYTyUAAAAAJ:hqOjcs7Dif8C)
- Mumtaz, A. K. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Pencari Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Grobogan*. <http://eprints.ipdn.ac.id/13776/>
- Nurdiana. (2019). *Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Batam* [Universitas Putera Batam]. <http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/5423>
- Rahma, F. (2023). *Strategi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Dalam Mengatasi Pengangguran Pada Masa Pandemi Covid-19* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74106>
- Rambe, R. C., Prihanto, P. H., & Hardiani. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 8(1), 54–67.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jels.v8i1.11967>
- Sunaini, N., & Winarni, F. (2020). *Strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Penganggulan Pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta*.  
<https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/joppar/article/view/21117>
- Tarmayati, As'ad, M. U., & Sugiannor. (2020). *Strategi Kinerja Dinas Koperasi Mikro dan Tenaga Kerja Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Selama Pandemi Covid-19 di Banjarmasin* [Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Ba]. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8517>
- Yuliyanti, R., & Handayani, N. (2022). STRATEGI MENGATASI PENGANGGURAN AKIBAT PANDEMI COVID-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 302–309.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i3.8114>